Bulletin of Indonesian Islamic Studies
journal homepage: https://journal.kurasinstitute.com/index.php/biis

Relevansi Pemikiran Pendidikan Al-Ṭaḥṭawī terhadap Politik Pendidikan Islam di Indonesia

Dedi Setiawan[1]*, Khodijah[2], Dedi Arianto[3]
[1] Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung, Indonesia
[2] Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, Indonesia
[3] Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Misbahul Ulum Gumawang Sumatera Selatan, Indonesia
*Correspondence: dedisetiawanpr@gmail.com
https://doi.org/10.51214/biis.v1i2.227

ABSTRACT

One of the Islamic Education figures in the modern era is Rifa'ah Baḍāwī Rāfi' Al-Ṭaḥṭawī. He was considered successful in formulating educational innovations following the times. This paper aims to describe the concept of Al-Tahtawi's education and relate it to the Islamic education system in Indonesia. This paper uses a type of literature-qualitative research. Data collection was carried out using the appropriate written reference source documentation technique. Data analysis was carried out using descriptive, content, and comparative methods. The results of the study show that Al-Ṭaḥṭawī has developed educational reform in Egypt through innovations such as the distribution of education based on age levels, universal education, education for all groups, gender equality, democratic education, and dynamic education. The political concept of Islamic education in Indonesia is the synergy between the state, politics, and education which encourages the formation of education following the ideals of the Indonesian nation. Meanwhile, the relevance of Al-Ṭaḥṭawī's educational thinking to the politics of Islamic education in Indonesia is that there are similarities in objectives in the delivery of education. These were marked by the development of educational innovations, educational renewal following current issues, the democratization of education, and improving the quality of human resources capable of mastering science and technology

ARTICLE INFO

Article History
Received: 04-06-2022
Revised: 06-12-2022
Accepted: 07-12-2022

Keywords:
Al-Ṭaḥṭawī Thoughts;
Political;
Islamic Education;

ABSTRAK

Salah satu tokoh Pendidikan Islam pada abad modern adalah Rifa'ah Baḍāwī Rāfi' Al-Ṭaḥṭawī. Dia dianggap berhasil dalam merumuskan inovasi pendidikan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan konsep pendidikan Al-Tahtawi dan mengaitkannya dengan sistem pendidikan Islam di Indonesia. Tulisan ini menggunakan jenis penelitian kualitatif kepustakaan. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi sumber rujukan tertulis yang relevan. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif, analisis isi, dan analisis perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Al-Ṭaḥṭawī telah mengembangkan pembaharuan pendidikan di Mesir melalui inovasi baru seperti pembagian pendidikan berdasarkan tingkat usia, pendidikan universal, pendidikan untuk semua golongan, kesetaraan gender, pendidikan demokratis, dan pendidikan dinamis. Konsep politik pendidikan Islam di Indonesia adalah sinergi antara negara, politik, dan pendidikan yang mendorong terbentuknya pendidikan yang sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Sementara, relevansi pemikiran pendidikan Al-Ṭaḥṭawī terhadap politik pendidikan Islam di Indonesia adalah adanya kesamaan tujuan dalam penyelenggaraan pendidikan. Ditandai dengan pengembangan inovasi pendidikan, pembaharuan pendidikan yang sesuai dengan isu aktual, demokratisasi pendidikan, dan peningkatan kualitas SDM pada aspek sains dan teknologi

Histori Artikel
Diterima: 04-06-2022
Direvisi: 06-12-2022
Disetujui: 07-12-2022

Kata Kunci:
Pemikiran Al-Ṭaḥṭawī;
Politik;
Pendidikan Islam;

A. PENDAHULUAN

Perjalanan pendidikan Islam di Indonesia senantiasa dihadapkan pada berbagai persoalan yang multi kompleks, mulai dari konseptual-teoritis sampai dengan operasional praktis. Hal ini dapat dilihat dari ketertinggalan pendidikan Islam dengan pendidikan lainnya baik secara kuantitatif maupun kualitatif, sehingga pendidikan Islam terkesan sebagai pendidikan "kelas dua".[1] Sesungguhnya sangat ironis, penduduk Indonesia yang mayoritas muslim, akan tetapi dalam hal pendidikan selalu tertinggal dengan umat lainnya. Catatan sejarah membuktikan bahwa kebijakan pendidikan Islam, khususnya di Indonesia mengalami pasang surut, tergantung siapa yang mempunyai peran dalam menentukan kebijakan tersebut. Sebagai bangsa yang mayoritas penduduknya beragama Islam, wajar jika pemerintah memberikan perhatian yang serius terhadap pendidikan Islam baik di sekolah negeri ataupun swasta. Namun adanya kondisi negara yang masih belum stabil akibat tarik ulur kepentingan antara kepentingan Negara yang terkadang berbeda haluan, menyebabkan terkendalanya implementasi kebijkan pendidikan Islam.

Azyumardi Azra, dalam Aslamiyah menjelaskan bahwa terdapat beberapa fenomena yang menyebabkan pendidikan Islam selalu dalam posisi tersingkirkan. *Pertama,* pendidikan Islam sering terlambat merumuskan diri untuk merespon perubahan dan kecenderungan perkembangan masyarakat, sekarang dan masa datang. *Kedua,* sistem pendidikan Islam kebanyakan masih lebih cenderung mengorientasikan diri pada bidang-bidang humaniora dan ilmu-ilmu sosial ketimbang ilmu-ilmu eksakta. *Ketiga,* usaha pembaharuan dan peningkatan sistem pendidikan Islam sering bersifat sepotong-potong atau tidak komprehensif dan menyeluruh, yang hanya dilakukan sekenanya atau seingatnya, sehingga tidak terjadi perubahan secara esensial di dalamnya. *Keempat,* sistem pendidikan Islam tetap lebih cenderung berorientasi ke masa silam ketimbang berorientasi ke masa depan, atau kurang bersifat *future-oriented. Kelima,* sebagian besar sistem pendidikan Islam belum dikelola secara profesional baik dalam perencanaan, penyiapan tenaga pengajar, kurikulum maupun pelaksanaan pendidikannya, sehingga kalah bersaing dengan lainnya.[2]

Berdasarkan hal diatas, maka diperlukan sebuah reformulasi sebagai upaya untuk mengatasi berbagai persoalan terkait dengan problem pendidikan Islam. Rifa'ah Al-Ṭaḥṭawī memiliki peran yang sangat penting dalam membangkitkan dan memajukan umat Islam untuk mengubah kondisi mereka menjadi lebih baik.[3] Hal tersebut dibuktikan dengan aktivitas intelektualnya, terlebih mengenai pendidikan, seperti dalam bukunya *al-Mursyīd al-Amīn fī Ta'līm al-Banāt wa al-Banīn*. Salah satu pemikiran pembaharuan pendidikan yang berhasil dirumuskan oleh Rifa'ah Al-Ṭaḥṭawī adalah pendidikan harus bersifat universal bagi seluruh umat Islam. Rumusan ini dapat dikatakan sebagai salah satu varian dari berbagai pandangan tentang pendidikan Islam sebelumnya. Maka pada abad ke 19, gagasan Al-Ṭaḥṭawī ini menjadi

[1] Gunawan Gunawan, Muhammad Adyan Simanjuntak, and Siti Marisa, "Compulsory Education Phenomenon for Islamic Education in Indonesia," *Al'Adzkiya International of Education and Sosial (AIoES) Journal* 3, no. 1 (April 16, 2022): 10–17, https://doi.org/10.55311/aioes.v3i1.183.

[2] Siti Suwaibatul Aslamiyah, "Problematika Pendidikan Islam Di Indonesia," *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman* 3, no. 1 (2013): 5.

[3] Masduki, "Pendidikan Islam dan Kemajuan Sains: Historisitas Pendidikan Islam yang Mencerahkan," *Jurnal Pendidikan Islam* 4, no. 2 (December 1, 2015): 261–75, https://doi.org/10.14421/jpi.2015.42.261-275.

salah satu bagian penting dari menguatnya diskursus pembaharuan '*al-tajdīd*', reformasi '*al-islāh'* dan pencerahan '*al-tanwīr*' pada kehidupan umat Islam di Mesir.[4]

Rifa' Al-Ṭaḥṭawī dalam hal ini telah menelurkan relevansi pemikiran pendidikan Islam yang kemudian digunakan sebagai rujukan oleh bangsa lain untuk membangun peradaban pendidikan yang baik. Al-Ṭaḥṭawī merupakan penduduk Mesir dan beliau sangat tertarik dengan kejayaan Islam di masa lalu.[5] Oleh karena itu, Al-Ṭaḥṭawī kemudian melakukan pembaharuan pemikiran pendidikan yang masif di pertengahan abad ke-19 di Mesir.[6]

Apabila melihat keberadaan pendidikan Islam di Indonesia, tentunya pemikiran pendidikan Al-Ṭaḥṭawī ada relevansinya. Pendidikan Islam di Indonesia sendiri seiring berkembangnya zaman terus mengalami pembaharuan seperti kurikulum, pemerataan pendidikan, otonomi pendidikan, dan sebagainya. Akan tetapi, pendidikan Islam di Indonesia tidak dapat terlepas dari intervensi politik. Pada era reformasi misalnya, menumbuhkan semangat desentralisasi, demokrasi, dan globalisasi yang kemudian menjalar ke sektor pendidikan sehingga terbitlah undang-undang yang mengatur tentang pendidikan. Salah satu produknya adalah UU No. 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai wadah untuk pembangunan pendidikan.[7] Oleh karena itu, untuk mengetahui bagaimana konsep pendidikan Islam yang digagas oleh Al-Ṭaḥṭawī tentang solusi problem pendidikan Islam modern serta relevansinya dengan politik pendidikan Islam di Indonesia sangat menarik dan penting untuk diteliti sebagai salah satu khazanah keilmuan di bidang pendidikan Islam dalam menjawab upaya integrasi keilmuan esakta dan non esakta.[8]

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan penulis, ada beberapa tulisan yang memiliki relevansi dengan tulisan ini. Pertama, artikel yang ditulis oleh Nuruddin mengenai ide pembaharuan yang dicetuskan oleh Al-Ṭaḥṭawī. Dengan penelitian kualitatif yang dilakukan, Nuruddin menyimpulkan bahwa ide pembaharuan yang dirumuskan dan ditawarkan oleh Al-Ṭaḥṭawī mencakup pembaharuan ketatanegaraan, pendidikan, dan patriotism.[9] Dalam tulisan tersebut, Nuruddin menjelaskan secara umum ide pmebaharuan yang digagas oleh Al-Ṭaḥṭawī, tidak spesifik pada aspek pendidikan. Paparan sejenis juga dilakukan oleh Dinda Sulastry yang menguraikan ide-ide pembaharuan yang digagas oleh Al-Ṭaḥṭawī bagi Mesir. Dia menyimpulkan bahwa gagasan pembaharaun yang dilakukan oleh Al-Ṭaḥṭawī mencakup bidang pendidikan, ekonomi, kesejahteraan, pemerintahan, dan patriotisme.[10] Artikel lain ditulis oleh John W. Livingston yang menyimpulkan bahwa Al-Ṭaḥṭawī melakukan pembaharuan pendidikan Islam, khususnya di Mesir dengan mengintegrasikan keilmuan *ala* Barat Saintifik-Positivistik yang merujuk pada konsep *burhani* dengan Pendidikan Islam yang

---

[4]Bobi Erno Rusadi and Dairina Yusri, "Pemikiran Pendidikan At-Tahthawi," *Al-Fikru: Jurnal Ilmiah* 13, no. 2 (2019): 93–99.

[5] Rakhmat Hidayat, *Pedagogi Kritis: Sejarah, Perkembangan, Dan Pemikiran* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013), 87.

[6] Desi Afrianti and Mulyadi Mulyadi, *Sejarah Pemikiran Dalam Islam* (Jambi: IAIN Sulthan Thaha Saifudin, 2015), 1–3.

[7] Abdullah Idi, "Pengembangan Kurikulum: Teori & Praktik, 48-52," *Yogyakarta: Ar-Ruzz Media*, 2013, 32.

[8] Nurdin Nurdin, "To Research Online or Not to Research Online: Using Internet-Based Research in Islamic Studies Context," *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 7, no. 1 (June 1, 2017): 31–54, https://doi.org/10.18326/ijims.v7i1.31-54.

[9] Nuruddin, "Ide Pembaharuan Napoleon Bonaparte Dan Al-Tahtawi Di Mesir," *Al-Ma'rifah* 12, no. 1 (April 30, 2015): 18–23, https://doi.org/10.21009/almakrifah.12.01.02.

[10] Dinda Sulastry, "Tokoh Pembaharuan Pendidikan Islam: Al-Tahtawi," *Studia: Jurnal Hasil Penelitian Mahasiswa* 4, no. 2 (October 21, 2019), https://doi.org/10.32923/stu.v4i2.1078.

bersifat *bayani.*[11] Selain itu ada artikel yang ditulis oleh David H. Warren yang mengatakan bahwa pemikiran Al-Ṭaḥṭawī tidak dipengaruhi oleh tradisi pemikitran Barat. Dia mendiskusikan pemikiran ilmuwan-ilmuwan klasik yang memperdebatkan tentang sinergi ilmu pengetahuan dan wahyu seperti perdebatan antara Ibn Rusyd dan Imam Al-Ghazali.[12]

Berdasarkan uraian di atas, peneliti melihat bahwa tulisan sebelumnya lebih spesifik menjelaskan tentang ide pembaharuan Al-Ṭaḥṭawī dalam berbagai aspek untuk kebangkitan Mesir. Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa belum ada tulisan sebelumnya yang mengkaji secara spesifik ide pembaharuan dalam pendidikan yang dirumuskan oleh Al-Ṭaḥṭawī dan menggunakannya sebagai kacamata untuk melihat pendidikan Islam dan Indonesia sekaligus menjadikannya sebagai pedoman bagi pengembangan inovasi pendidikan di Indonesia. Untuk itu tulisan ini bertujuan untuk mengungkapkan ide-ide Al-Ṭaḥṭawī dalam pendidikan Islam dan berupaya memotret pendidikan Islam di Indonesia melalui ide-ide tersebut sebagai bahan perbandingan dan evaluasi.

B. METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan '*library reseach*'.[13] Studi kepustakaan merupakan penelitian yang menggunakan sumber buku, jurnal, tesis, skripsi, dan sumber hasil penelitian lain yang relevan dan bertujuan untuk mendapatkan informasi secara lengkap serta untuk menentukan tindakan yang akan diambil dalam penulisan jurnal. Prinsip-prinsip dalam yang biasa digunakan dalam studi kepustakaan adalah prinsip relevansi dan prinsip kemuthakhiran.[14] Teknik pengumpulan yang dilakukan adalah hasil dari dokumentasi atas sumber rujukan yang ada serta informasi tertulis lain. Analisis data penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, analisis isi, dan analisis perbandingan.[15] Sumber data primer dalam tulisan ini adalah kitab *Manāhij al-Albāb al-Miṣriyyah fī Mabāhij al-Adab al-'Asriyah* dan kitab *Takhlīṣ al-Ibrīz fī Talkhīs al-Bāriz* karya Al-Ṭaḥṭawī.

C. HASL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian yang dapat penulis jabarkan berkaitan dengan relevansi pemikiran Al-Ṭaḥṭawī terhadap politik pendidikan Islam di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Konsep Pemikiran Pendidikan Al-Ṭaḥṭawī

Produk pemikiran pendidikan Al-Ṭaḥṭawī sangat berguna bagi perkembangan di ranah pendidikan di negara Mesir bahkan di seluruh dunia. Al-Ṭaḥṭawī selalu menekankan bahwa pendidikan harus selalu menciptakan inovasi-inovasi yang sesuai dengan kultur negara dan dinamika perkembangan zaman. Pendidikan yang berkarakter sangat penting guna mengembangkan bakat dan minat siswa yang kemudian berguna untuk membangun

---

[11] John W. Livingston, "Western Science and Educational Reform in the Thought of Shaykh Rifaa Al-Tahtawi," *International Journal of Middle East Studies* 28, no. 4 (1996): 543–64.

[12] David H. Warren, "For the Good of the Nation: The New Horizon of Expectations in Rifaʿa al-Tahtawi's Reading of the Islamic Political Tradition," *American Journal of Islam and Society* 34, no. 4 (April 10, 2017): 30–55, https://doi.org/10.35632/ajis.v34i4.178.

[13] Wahyudin Darmalaksana, *Metode Penelitian Kualitatif, Studi Pustaka, Dan Studi Lapangan* (Bandung: Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020), 65.

[14] Nursapia Nursapia, "Penelitian Kepustakaan," *IQRA`: Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi (e-Journal)* 8, no. 1 (May 4, 2014): 69.

[15] Sutrisno Hadi, "Metodologi Research I. Yogyakarta: Andi Offset., 1993," *Metodologi Research II*, 1990, 54.

peradaban bangsanya sendiri.[16] Dengan pembentukan sumber daya manusia yang kompetitif maka kemajuan sebuah bangsa akan dapat terealisasikan dengan baik.[17] Pendidikan harus bersifat universal, untuk semua golongan, kesetaraan gender, demokratis, dan dinamis mengikuti perkembangan zaman.

Al-Ṭaḥṭawī dalam menerapkan dinamika pendidikan juga menerapkan beberapa metode, seperti membagi tingkatan pendidikan berdasarkan usia, membagi jenis pendidikan berdasarkan bakat dan minat siswa, jenis profesi merupakan kecenderungan bakat dan minat siswa, pendidikan dasar wajib ditempuh oleh semua orang tanpa memandang status sosial, keluarga dan negara memiliki peran penting dalam kontrol pendidikan, pelarangan terhadap tindakan kekerasan di dunia pendidikan, dan pendidikan berfungsi untuk memanusiakan manusia.[18]

2. Konsep Politik Pendidikan di Indonesia

Politik pendidikan merupakan suatu tindakan yang kemudian menjadi suatu kebijakan yang berasal dari pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan yang sesuai dengan kepentingan bangsa dan negara. Negara, politik, dan pendidikan merupakan serangkaian konsep yang saling terkait guna menerapkan regulasi pendidikan demi tercapainya cita-cita bangsa Indonesia. Upaya-upaya pemerintah dalam tercapainya mutu dan kualitas pendidikan telah terjadi ketika zaman pra sejarah hingga era reformasi pada saat ini. Kebijakan penyelenggaraan pendidikan selalu berubah-ubah menyesuaikan keadaan bangsa yang juga dipengaruhi oleh suasana politik. Untuk menyelenggarakan pendidikan, kemudian terbitlah UU No. 23 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mana pada hakikatnya pendidikan harus berprinsip mencerdaskan kehidupan bangsa, pembaharuan pendidikan yang sesuai dengan perkembangan zaman, pendidikan yang berkarakter, peningkatan kuailifikasi akademik bagi tenaga pengajar, pembentukan SDM yang berkualitas tinggi, penekanan penguasaan IPTEK, dan otonomi pendidikan. Dengan demikian, diharapakan pendidikan mampu membangun peradaban bangsa yang berkemajuan dan sesuai dengan nilai-nilai ke-Indonesiaan.

Menurut Ahmad Fikri Sabiq dan Tamassaka Dinul Haq dalam Makalah Politik Pendidikan Agama Islam di Indonesia arah kebijakan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia berdasarkan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,[19] yaitu: (a) Pembaharuan SDM Indonesia yang bermutu tinggi dengan perluasan, pemerataan, dan kesempatan pendidikan yang bagi seluruh rakyat Indonesia untuk dengan meningkatan anggaran pendidikan. (b) Pembaharuan kualifikasi akademik, profesional, dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kependidikan tercipta pendidikan watak dan budi pekerti yang kemudian diharapkan mampu mengembalikan wibawa suatu lembaga dan tenaga kependidikan. (c) Pembaharuan sistem pendidikan, seperti: kurikulum, diversifikasi kurikulum sebagai fasilitator keberagaman peserta didik, pemberlakuan kurikulum nasional dan lokal untuk menyesuaikan keadaan daerah setempat, dan diversifikasi pendidikan profesi. (d) Pembaharuan pendidikan formal dan non formal sebagai pusat pembudayaan nilai sikap, dan kemampuan. Selain itu, meningkatkan partisipasi keluarga dan masyarakat

---

[16] Rifa'ah Badhawi Rafi' al-Tahwi, *Manahij Al-Albab al-Misriyyah Fi Mabahij al-Adab al-'Asriyah* (United Kingdom: Hindawi, 2017), 54.

[17] al-Tahwi, 65.

[18] Rifa'ah Badhawi Rafi' al-Tahwi, *Takhlis Al-Ibriz Fi Talkhiz al-Bariz* (United Kingdom: Hindawi, 2017), 87.

[19] Ahmad Fikri Sabiq, "Kebijakan Politik Dan Dampaknya Terhadap Pendidikan Agama Islam Di Indonesia," *Lentera* 5, no. 2 (2021): 43.

yang ditunjang dengan sarana prasarana memadai. (e) Pembaharuan sistem pendidikan nasional berdasarkan asas manajemen, desentralisasi, dan otonomi keilmuan.[20] (f) Pembaharuan kualitas lembaga pendidikan baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat guna mencetak sistem pendidikan yang efektif dan efesien dalam menghadapi pembaharuan IPTEK dan seni. (g) Pembaharuan kualitas SDM secara terarah, terpadu, dan menyeluruh melalui upaya proaktif dan reaktif oleh seluruh komponen agar generasi muda berkembang secara optimal dengan berbagai dukungan dan lingkungan yang sesuai dengan potensinya. (h) Pembaharuan penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan IPTEK, seperti dalam usaha kecil, menengah,[21] dan koperasi untuk meningkatkan daya saing produk berbasis potensi sumber daya lokal.

3. Relevansi Pemikiran Pendidikan Al-Ṭaḥṭawī Terhadap Politik Pendidikan Islam di Indonesia

Konsep pemikiran Al-Ṭaḥṭawī dengan konsep pendidikan Islam di Indonesia ternyata terdapat berbagai kesamaan yang pada intinya adalah membangun penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas. Sebagai contoh adalah Al-Ṭaḥṭawī berkonsep bahwa pendidikan harus berdasarkan tingkatan usia siswa. Di Indonesia juga menerapkan pendidikan yang sama dengan menerapkan Madrasah Ibtidayah untuk jenjang usia anak-anak, Madrasah Tsanawiyah untuk jenjang usia remaja awal, dan Madrasah Aliyah untuk jenjang remaja.

Peran negara terhadap pendidikan adalah dengan selalu hadir memberikan *support* terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan. Sebagai contoh adalah negara memberikan fasilitas dalam pembentukan kurikulum, pemberian fasilitas untuk pengembangan bakat dan minat siswa, pemberian fasilitas untuk meningkatkan kualitas tenaga pendidik, dan pemberian fasilitas kepada publik untuk hak memperoleh pendidikan.

Sementara posisi pendidikan Islam telah mengalami kemajuan. Hal tersebut dibuktikan dengan kesetaraan pendidikan Islam dengan pendidikan umum dalam segi apapun. Tidak ada perbedaan berarti seperti dalam daalm hak memperoleh pekerjaan, hak melanjutkan jenjang pendidikan, dan sebagainya. Justru pendidikan Islam menawarkan konsep yang lebih komplit daripada pendidikan umum yang mana selain mempelajari ilmu agama juga mempelajari ilmu umum. Hal tersebut sangat diperlukan bagi semua orang untuk memiliki ilmu dan pengetahuan yang komplit guna menghadapi tantangan di era globalisasi saat ini.

Sebagai pelopor pembaharu pendidikan Islam, ada beberapa pokok pemikiran pendidikan Al-Ṭaḥṭawī, yaitu: (a) Ajaran Islam bersifat dinamis yang mana selain kehidupan akhirat, pendidikan Islam harus memprioritaskan kehidupan duniawinya. (b) Kekuasaan raja dibatasi oleh hukum atau syari'at serta raja dalam menentukan kebijakan harus bermusyawarah dengan Ulama dan kalangan akademis. (c) Syari'at atau hukum harus bersifat dinamis dan sesuai dengan perkembangan zaman modern. (d) Kalangan ulama diwajibkan mempelajari filsafat dan ilmu pengetahuan modern yang kemudian diintegrasikan dengan hukum atau syariat dan kebutuhan pada zaman modern. (e) Pendidikan bersifat universal dan diperuntukkan untuk semua golongan. Selain itu, kedudukan wanita sama dengan laki-laki dalam memperoleh kesempatan mengenyam pendidikan. (f) Umat Islam harus bersifat

---

[20] Muhammad Sholeh Hoddin, "Dinamika Politik Pendidikan Islam Di Indonesia; Studi Kebijakan Pendidikan Islam Pada Masa Pra-Kemerdekaan hingga Reformasi.," *Jurnal Ilmiah Iqra'* 14, no. 1 (October 30, 2020): 15–30, https://doi.org/10.30984/jii.v14i1.1035.

[21] Wildani Hefni, "Kebijakan Politik dalam Pengembangan Tradisi Akademik Intelektual Perguruan Tinggi Keagamaan Islam," *Akademika : Jurnal Pemikiran Islam* 23, no. 1 (August 18, 2018): 107–28.

dinamis dan meninggalkan sifat statis. Hal tersebut bertujuan agar umat Islam dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan global.[22]

Al-Ṭaḥṭawī juga membagi tahapan-tahapan pendidikan yaitu: Tahap I pendidikan dasar, yang mana materi pelajaran yang diajarkan adalah dasar membaca dan menulis, berhitung, Al-Qur'an, agama, dan matematika. Tahap II pendidikan menengah, yang mana materi pelajaran yang diajarkan adalah ilmu sastra, ilmu alam, biologi, bahasa asing, dan ilmu-ilmu keterampilan.Tahap III pendidikan tinggi, yang materi pelajaran yang diajarkan adalah menyiapkan tenaga ahli dalam berbagai disiplin ilmu. Al-Ṭaḥṭawī menekankan kepada pendidik agar selalu memiliki kesabaran dan kasih sayang dalam proses belajar mengajar dan melarang adanya tindak kekerasan, pemukulan, dan lain-lain, karena dapat merusak mental peserta didik.[23] Metode-metode yang digunakan Al-Ṭaḥṭawī didalam dunia pendidikan Islam yaitu: (a) Pendidikan Islam terbagiberdasarkantingkatanusiadanmengutamakan kemampuan setiap individu. Materi pelajaran yang diajarkan seperti kemampuan menulis, membaca, ilmutauhid, matematika dasar, dan olah raga (memanah, berenang, dan bermain pedang). (b) Setelah menempuh pendidikan dasar, seseorang perlu menentukan jenis pendidikannya berdasarkanpengetahuan, bakat, dan minatnya. Oleh karena itu, setiap orang tua wajib mengamati bakat dan kecenderungan anaknya untuk menemukan keselarasan atau kesiapan mental, potensi yang dimilikinya, dan keberlangsungan proses belajar anak. (c) Al-Ṭaḥṭawī menyatakan bahwa jenis pekerjaan atau profesi dapat ditentukan dengan kecenderungan ataukeahlian masing-masing anak. (d) Al-Ṭaḥṭawī mewajibkan seseorang mengenyam pendidikandasar tanpa mempertimbangan status dan tingkatan sosialnya. Adapun pendidikan tinggi terbatas untuk orang-orang yang dianggap mampu secara finansial. Hal tersebut didasarkan pada kondisi sosial masyarakatMesir saat itu yang masih terbelakang. (e) Keluarga dan negara memiliki peran yang penting dalam pendidikan. Sebagai contoh pendidikan paling awal dilakukan di rumah di bawah asuhan ibu. Seorang ibu berperan sebagai pendidik di masa awal dan pengaruhnyaluarbiasaketika menginjak dewasa. Sedangkan negara sebagai fasilitator dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan pengajaran untuk kemajuan negara. (f) Al-Ṭaḥṭawī melarang kerasadanya kekerasan di dunia pendidikan.Al-Ṭaḥṭawī menekankan pembaharuan metode pendidikan dengan menampilkan metode pengajaran yang variatif seperti permainan, diskusi danlainnya agar siswa termotivasi agar semangat dalam belajar. (g) Al-Ṭaḥṭawī menekankan mengembalikan fungsi dan tujuan pendidikan. Fungsi pendidikan adalah mengembangkan akal dan melatih indera pemikiran menjadi lebih sempurna. Adapun tujuan pendidikan adalah semata-mata tidak menjadikan orang pintar, namun lebih kepada aspek membangun peserta didik menjadi lebih baik dari sisifisik dan mental. Dalam hal pengembangan beberapa aspek tersebut, pendidik perlu berkomunikasi dengan bahasa dan kondisi nyata yang terjadi. Sebagai contoh, di masyarakat militer pendidikan diarahkan pada pembentukan karakter militer, apabila negara agraris, pendidikan yang berbasiskan pertanian harus lebih diprioritasikan, dan sebagainya.[24]

[22]Tiy Kusmarrabbi Karo, "Modernisasi Pendidikan Islam Di Mesir," *WARAQAT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 2, no. 2 (2017): 24–24.

[23] Muhammad Fauzi, "Tokoh-Tokoh Pembaharu Pendidikan Islam Di Mesir," *Jurnal Tarbiyah* 24, no. 2 (2017).

[24]Warren, "For the Good of the Nation."

Negara Indonesia merupakan negara yang kehidupannya sangat kompleks dibandingkan negara-negara lain. Di negara Indonesia, pendidikan tidak dapat terlepas dari intervensi politik.Hal tersebut dikarenakan politik, negara, dan pendidikan secara berkesinambungan membuat suatu arah kebijakan yang kemudian menjadikan bentuk peradaban dari bangsa Indonesia itu sendiri.Politik adalah sarana yang mengantarkan individu maupun kelompok untuk mencapai tujuan tertentu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan negara adalah organisasi didalam suatu masyarakat yang memiliki visi misi yang sama untuk bersatu, hidup didalam wilayah tertentu, dan memiliki sistem pemerintahan yang berdaulat. Adapun pendidikan ialah proses transfer ilmu, pengetahuan, dan nilai-nilai yang ditujukan kepada tujuan yang mulia. Oleh karena itu, antara politik, negara, dan pendidikan terdapat hubungan harmonis yang mana arah politik di kehidupan berbangsa dan bernegara tidak akan tergapai jika aspek pendidikan diabaikan. Sebaliknya jika sistem pendidikan tidak akan terlaksana dengan baik apabila tidak diintegrasikan dan *disupport* dengan sistem politik yang baik.[25]

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pendidikan Islam di Indonesia apabila ditinjau dari relevansi pemikiran pendidikan Al-Ṭaḥṭawī ada sejumlah aspek yang saling berkaitan. Hal-hal yang berkaitan yaitu:

a. Pembagian Pendidikan Berdasarkan Tingkatan Usia

Kementerian Agama menerbitkan Permenag No. 1 Tahun 1946 guna meningkatkan madrasah atas masukan dari BPKNIP yang selanjutnya diperbaharuimenjadi Permenag No. 7 Tahun 1952 yang membahas jenjang pendidikan di madrasah. Menurut peraturan ini jenjang pendidikan di madrasah yaitu: (1) Madrasah Rendah (Madrasah Ibtidaiyah), adalah madrasah yang memuat materi pelajaran pendidikan umum dan ilmu pengetahuan agama Islam serta lama pendidikannya 6 tahun. (2) Madrasah Lanjutan Tingkat Pertama (Madrasah Tsanawiyah), adalah madrasah yang peserta didiknya berasal dari SD/MI/sederajat. Materi pelajaran pendidikan umum dan ilmu pengetahuan agama Islam serta lama pendidikannya 3 tahun. (3) Madrasah Lanjutan Atas (Madrasah Aliyah), adalah madrasah yang pesrta didiknya berasal dari SMP/MTs/sederajat. Materi pelajaran pendidikan umum dan ilmu pengetahuan agama Islam serta lama pendidikannya 3 tahun.

Sebagai langkah memperbaharui mutu madrasah, baik yang dikelola oleh masyarakat, pribadi, organisasi, dan swasta kemudian pemerintah kemudian menjadikan madrasah-madrasah menjadi madrasah negeri. Madrasah-madrasah yang dinegerikan mulai dari dasar Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN), Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN), dan Madrasah Aliyah Negeri (MAN).[26]

b. Peran Negara dalam Pendidikan

Upaya pemerintah Indonesia guna melakukan pembaharuan pendidikan Islam dan menjadi isu aktual yang sangat relevan dengan pemikiran pendidikan Al-Ṭaḥṭawī adalah sebagai berikut: (1) Pendidikan berbasis afeksi diperbaharui secara sistematis dan terprogram. Oleh karena itu, pendekatan keterampilan proses perlu ditunjang dengan buku panduan dan diberikan perhatian secara khusus yang disebarkan melalaui sekolah/madrasah. (2) Pelaksanaan program intrakulikuler dan ekstrakulikuler perlu dilaksanakan dengan baik yang

[25]Kasful Anwar Us, "Dimensi Hubungan Negara, Politik Dan Pendidikan," *Ta'dib: Jurnal Pendidikan Islam* 15, no. 02 (2010): 297–308.

[26] Hoddin, "Dinamika Politik Pendidikan Islam Di Indonesia; Studi Kebijakan Pendidikan Islam Pada Masa Pra-Kemerdekaan hingga Reformasi."

kemudian hasilnya dijadikan untuk standar kelulusan. (3) Pengelompokan siswa yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi perlu diperhatikan dengan serius, karena tidak semua siswa mampu secara potensial dan finansial melanjutkan belajar di perguruan tinggi. Oleh karena itu, perlu didesain dengan mantap misalnya SMK diperbanyak atas jenisnya. Di sisi lain, pendirian perguruan tinggi swasta dibatasi dan akreditasinya diperketat. (4) Tenaga pendidik dan kependidikan diberikan perhatian khusus, karena mereka merupakan penghubung lahirnya SDM yang berkulaitas. Oleh karena itu, kemudian pemerintah mengadakan uji kompetensi atau pelatihan guru melalui Pusat Kegiatan Guru (PKG), Musyawarah Guru Bidang Studi (MGBS), dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). (5) Pelaksanaan wajib belajar 9 tahun perlu dlakukan penelitian dan pengkajian secara mendalam guna menemukan faktor penunjang dan faktor penghambatnya.[27]

c. Posisi Pendidikan Islam

Posisi pendidikan Islam pasca orde baru yang kemudian berganti menjadi orde reformasi tahun 1998.Hal ini dipicu tuntutan mahasiswa agar terciptanya ruang kebebasan pers, demokrasi dan otonomi daerah. Sebagai contoh, produk hasil reformasi adalah UU No. 22 tahun 1999 direvisi menjadi UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Selain itu, di bidang pendidikan lahir UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mana sistem pendidikan diharapkan dapat menjamin pemerataan pendidikan, peningkatan mutu, dan relevansi serta efisiensi pendidikan dalam menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Oleh karena itu, pemerintah memperbaharui pendidikan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan. Pemerintah kemudian memberikan kebijakan otonomi daerah yang mana pemerintah daerah dapat merencanakan, menyelenggarakan, memberi pelayanan, mengevaluasi, dan mengembangkan bidang pendidikan guna terciptanya rasa keadilan serta demokratisasi otonomi guna pelayanan yang cepat, tepat, efisien, dan murah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang pendidikan.

Program pendidikan yang menjadi agenda perbaikan sistem pendidikan nasional di era reformasi ada empat, yaitu: peningkatan mutu pendidikan, efisiensi pengelolaan pendidikan, relevansi pendidikan, dan pemerataan pelayanan pendidikan. Keempat agenda tersebut di prakarsai oleh keinginan dan tuntutan bangsa Indonesia untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan di bidang pendidikan.[28]

Dengan adanya pembaharuan di bidang pendidikan, kemudian hal tersebut sangat menguntungkan keberadaan posisi madrasah di lingkup pendidikan formal. Keuntungan tersebut berdasarkan SKB 3 menteri yaitu: (1) Ijazah lulusan madrasah memiliki nilai sama dengan ijazah sekolah umum/sederajat. (2) Lulusan madrasah bisa melanjutkan ke sekolah umum/sederajat lebih di atasnya. (3) Peserta didik dari madrasah bisa berpindah ke sekolah umum/sederajat

Hal tersebut bersumber dari SKB Tiga Menteri Tahun 1975, Bab II, Pasal 2 yang mana dengan demikian eksistensi madrasah yaitu: (1) Eksistensi madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam lebih mantap dan kuat. (2) Pengetahuan umum di seluruh madarasah dapat

---

[27] Umar Tirtarahardja and SL La Sulo, "Pengantar Pendidikan, Jakarta: PT," *Rineka Cipta*, 2005, 257.

[28] Hamlan Andi Baso Malla, "Kajian Sosio Historis Tentang Politik Kebijakan Pendidikan Islam Di Indonesia," *Inspirasi* 1, no. 14 (2011).

lebih meningkat. (3) Fasilitas fisik dan peralatan lebih disempurnakan. (4) Adanya *civil effect* terhadap ijazah madrasah.[29]

SKB 3 Menteri Tahun 1975 menjadi titik awal produk pengembangan kurikulum di lingkungan madrasah.Kurikulum madrasah memiliki komposisi 70% pelajaran umum dan 30% pelajaran agama.*Peng-upgrade-an* kurikulum ini sebagai upaya harmonisasi dualisme pendidikan Islam di Indonesia serta meningkatkan kualitas pendidikan madrasah agar kompetitif. Pasca SKB 3 Menteri, juga didirikan Madrasah Aliyah Program Khusus (MAPK) guna melahirkan produk lulusan sebagai calon ulama yang mampu merespon pembangunan bangsa dengan baik. Selain itu, madrasah memiliki status baru sebagai sekolah umum berciri khas Islam dan madrasah memiliki kedudukan sama dengan sekolah-sekolah umum lainnya.[30]

D. SIMPULAN DAN SARAN

Adapun kesimpulan dari penjabaran tentang relevansi pemikiran pendidikan Al-Ṭaḥṭawī terhadap politik pendidikan di Indonesia yaitu sebagai berikut: Pertama, konsep pemikiran pendidikan Al-Ṭaḥṭawī telah menunjukkan penyelenggaraan pendidikan yang modern dengan mengutamakan banyak aspek. Pendidikan didesain untuk kepentingan kemajuan negaranya dengan selalu mengembangkan inovasi-inovasi menyesuaikan isu teraktual. Kedua, konsep politik pendidikan di Indonesia negara, politik, dan pendidikan saling berketerkaitan anatara satu dengan yang lain. Hal tersebut sebagai upaya untuk menyelenggrakan pendidikan yang sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Ketiga, relevansi pemikiran pendidikan Al-Ṭaḥṭawī terhadap politik pendidikan di Indonesia adalah terdapat berbagai keasamaan diantaranya yaitu penyelenggaraan pendidikan berdasarkan tingkatan usia, kontrol negara terhadap politik dan penyelenggaraan pendidikan yang sangat baik, dan posisi pendidikan Islam yang telah mengalami perkembangan yang pesat setelah dikeluarkannya kebijakan bahwa pendidikan Islam setara dengan pendidikan umum dari pemerintah.

Daftar Pustaka

Afrianti, Desi, and Mulyadi Mulyadi. *Sejarah Pemikiran Dalam Islam*. Jambi: IAIN Sulthan Thaha Saifudin, 2015.

Aslamiyah, Siti Suwaibatul. “Problematika Pendidikan Islam Di Indonesia.” *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman* 3, no. 1 (2013): 5.

Darmalaksana, Wahyudin. *Metode Penelitian Kualitatif, Studi Pustaka, Dan Studi Lapangan*. Bandung: Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020.

Fauzi, Muhammad. “Tokoh-Tokoh Pembaharu Pendidikan Islam Di Mesir.” *Jurnal Tarbiyah* 24, no. 2 (2017).

Gunawan, Gunawan, Muhammad Adyan Simanjuntak, and Siti Marisa. “Compulsory Education Phenomenon for Islamic Education in Indonesia.” *Al’Adzkiya International of Education and Sosial (AIoES) Journal* 3, no. 1 (April 16, 2022): 10–17. https://doi.org/10.55311/aioes.v3i1.183.

Hadi, Sutrisno. “Metodologi Research I. Yogyakarta: Andi Offset., 1993.” *Metodologi Research II*, 1990.

Hefni, Wildani. “Kebijakan Politik dalam Pengembangan Tradisi Akademik Intelektual Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.” *Akademika : Jurnal Pemikiran Islam* 23, no. 1 (August 18, 2018): 107–28.

---

[29] Supriadin Supriadin, “Politik Pendidikan Islam Di Indonesia: Analisis Sistem Pendidikan Pesantren Dan Madrasah,” *EL-HIKMAH: Jurnal Kajian Dan Penelitian Pendidikan Islam* 8, no. 2 (2014): 87.

[30] Rengga Satria, “Pembaruan Pendidikan Islam Di Madrasah Tarbiyah Islamiyah Canduang,” *Geneologi PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 6, no. 1 (2019): 15–22.

Hidayat, Rakhmat. *Pedagogi Kritis: Sejarah, Perkembangan, Dan Pemikiran*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013.

Hoddin, Muhammad Sholeh. "Dinamika Politik Pendidikan Islam Di Indonesia; Studi Kebijakan Pendidikan Islam Pada Masa Pra-Kemerdekaan hingga Reformasi." *Jurnal Ilmiah Iqra'* 14, no. 1 (October 30, 2020): 15–30. https://doi.org/10.30984/jii.v14i1.1035.

Idi, Abdullah. "Pengembangan Kurikulum: Teori & Praktik, 48-52." *Yogyakarta: Ar-Ruzz Media*, 2013.

Karo, Tiy Kusmarrabbi. "Modernisasi Pendidikan Islam Di Mesir." *WARAQAT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 2, no. 2 (2017): 24–24.

Livingston, John W. "Western Science and Educational Reform in the Thought of Shaykh Rifaa Al-Tahtawi." *International Journal of Middle East Studies* 28, no. 4 (1996): 543–64.

Malla, Hamlan Andi Baso. "Kajian Sosio Historis Tentang Politik Kebijakan Pendidikan Islam Di Indonesia." *Inspirasi* 1, no. 14 (2011).

Masduki. "Pendidikan Islam dan Kemajuan Sains: Historisitas Pendidikan Islam yang Mencerahkan." *Jurnal Pendidikan Islam* 4, no. 2 (December 1, 2015): 261–75. https://doi.org/10.14421/jpi.2015.42.261-275.

Nurdin, Nurdin. "To Research Online or Not to Research Online: Using Internet-Based Research in Islamic Studies Context." *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 7, no. 1 (June 1, 2017): 31–54. https://doi.org/10.18326/ijims.v7i1.31-54.

Nursapia, Nursapia. "Penelitian Kepustakaan." *IQRA`: Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi (e-Journal)* 8, no. 1 (May 4, 2014): 68–73.

Nuruddin. "Ide Pembaharuan Napoleon Bonaparte Dan Al-Tahtawi Di Mesir." *Al-Ma'rifah* 12, no. 1 (April 30, 2015): 18–23. https://doi.org/10.21009/almakrifah.12.01.02.

Rusadi, Bobi Erno, and Dairina Yusri. "Pemikiran Pendidikan At-Tahthawi." *Al-Fikru: Jurnal Ilmiah* 13, no. 2 (2019): 93–99.

Sabiq, Ahmad Fikri. "Kebijakan Politik Dan Dampaknya Terhadap Pendidikan Agama Islam Di Indonesia." *Lentera* 5, no. 2 (2021).

Satria, Rengga. "Pembaruan Pendidikan Islam Di Madrasah Tarbiyah Islamiyah Canduang." *Geneologi PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 6, no. 1 (2019): 15–22.

Sulastry, Dinda. "Tokoh Pembaharuan Pendidikan Islam: Al-Tahtawi." *Studia: Jurnal Hasil Penelitian Mahasiswa* 4, no. 2 (October 21, 2019). https://doi.org/10.32923/stu.v4i2.1078.

Supriadin, Supriadin. "Politik Pendidikan Islam Di Indonesia: Analisis Sistem Pendidikan Pesantren Dan Madrasah." *EL-HIKMAH: Jurnal Kajian Dan Penelitian Pendidikan Islam* 8, no. 2 (2014): 18–41.

Tahwi, Rifa'ah Badhawi Rafi' al-. *Manahij Al-Albab al-Misriyyah Fi Mabahij al-Adab al-'Asriyah*. United Kingdom: Hindawi, 2017.

———. *Takhlis Al-Ibriz Fi Talkhiz al-Bariz*. United Kingdom: Hindawi, 2017.

Tirtarahardja, Umar, and SL La Sulo. "Pengantar Pendidikan, Jakarta: PT." *Rineka Cipta*, 2005.

Us, Kasful Anwar. "Dimensi Hubungan Negara, Politik Dan Pendidikan." *Ta'dib: Jurnal Pendidikan Islam* 15, no. 02 (2010): 297–308.

Warren, David H. "For the Good of the Nation: The New Horizon of Expectations in Rifaʿa al-Tahtawi's Reading of the Islamic Political Tradition." *American Journal of Islam and Society* 34, no. 4 (April 10, 2017): 30–55. https://doi.org/10.35632/ajis.v34i4.178.